

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI  
(BIDANG KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, ASKES, JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang	:	2008-2009
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke	:	--
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	:	Direktur Utama Rumah Sakit Husada dan Ketua Umum Serikat Karyawan Rumah Sakit Husada
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Kamis, 11 Juni 2009
Pukul	:	10. <sup>00</sup> WIB – selesai
Acara	:	Membicarakan tentang permasalahan Karyawan Rumah Sakit Husada
Ketua Rapat	:	dr. Umar Wahid, SpP/ Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat	:	Dra. Tri Udiartiningrum /Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota Hadir	:	32 orang anggota dari 50 anggota, 4 orang anggota ijin

**I. PENDAHULUAN**

Rapat dibuka pukul 10.20 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 99 ayat (1), rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN**

1. a. Serikat Karyawan menyampaikan permasalahan kepada Komisi IX DPR RI sebagai berikut :
  1. Tidak ada program kesejahteraan untuk karyawan dan tidak ada rasa keberpihakan terhadap karyawan serta kurang menghargai karyawan yang sudah mengabdikan sekian lama terhadap Rumah Sakit Husada.
  2. Perjanjian Kerja Sama (PKB) yang sudah disepakati banyak yang tidak dijalankan oleh manajemen.
  3. Struktur organisasi yang tidak jelas dan tidak pernah disosialisasikan kepada karyawan.
  4. Orientasi kebijakan yang dibuat Direksi saat ini hanya bisnis semata dan menguntungkan individu bukan menguntungkan Rumah Sakit Husada secara keseluruhan.
  5. Sikap dan tindakan Direksi yang sangat arogan, terkesan yang memiliki Rumah Sakit Husada, sehingga banyak kebijakan yang sewenang-wenang dan sangat merugikan karyawan.

- b. Manajemen menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Manajemen telah melakukan perubahan-perubahan kebijakan antara lain mengenai catering, struktur dan lain-lain, setiap pagi selalu melakukan pertemuan secara rutin dengan para manajer.
  2. Unjuk rasa yang dilakukan karyawan menuntut Direksi Rumah Sakit Husada mundur karena diduga telah melakukan korupsi, karyawan menuntut manajemen diaudit
  3. Pada tanggal 21 April dibentuk Badan Bipartit dengan adanya pihak konsultan untuk menjembatani komunikasi antara karyawan dengan manajemen.
  4. Tuntutan mencabut skorsing Saudara Leila Gentjana dan Saudara Encep Ishaq serta tuntutan mencabut laporan Polisi harus dibicarakan lebih dahulu dengan Perkumpulan Pengurus Husada.
2. Anggota Komisi IX DPR RI menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pihak manajemen harus memperlakukan karyawan sebagai mitra kerja dan selalu dilakukan komunikasi karena kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan adalah melakukan komunikasi secara intensif.
  - b. Mengharapkan kepada manajemen untuk tidak melakukan skorsing kepada Saudara Leila Gentjana dan Saudara Encep serta mencabut laporan ke Polisi, sehingga karyawan tetap bekerja kembali seperti biasa.
  - c. Perlu ada kesepakatan antara ke dua pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan sehingga penyampaian aspirasi para karyawan tidak dilakukan melalui demonstrasi tetapi dengan cara persuasif.

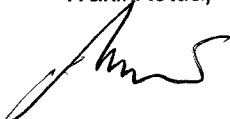
### III RANGKUMAN

Berdasarkan substansi dan proses diskusi yang terjadi pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direksi dan Serikat Karyawan Rumah Sakit Husada, Komisi IX DPR RI menyatakan :

1. Komisi IX DPR RI mengharapkan kepada Manajemen dengan Serikat Karyawan Rumah Sakit Husada untuk berdamai dan menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara yang baik, bijak dan saling menghargai dengan mengacu pada Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Komisi IX meminta kepada pihak manajemen Rumah Sakit Husada agar mengadakan pertemuan rutin untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak sehingga perselisihan yang sekarang ada bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak pihak Direksi Rumah Sakit Husada untuk melakukan dialog dengan Serikat Karyawan dan meminta mencabut skorsing Saudara Leila Gentjana dan Saudara Encep Ishaq dan laporan polisi terhadap ke 2 karyawan tersebut.
4. Komisi IX DPR RI meminta pihak Direksi untuk memberikan laporan secara tertulis mengenai keputusan hasil rapat Direksi Rumah Sakit Husada dengan Pengurus Perkumpulan Husada paling lambat sudah disampaikan kepada Komisi IX DPR RI hari Senin, 15 Juni 2009.

**Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.**

Jakarta, 11 Juni 2009  
Pimpinan Komisi IX DPR-RI  
Wakil Ketua,



**dr. Umar Wahid Hasjim, SpP**